



Kendala PAD Tidak Tercapai Banyak Temuan

anggaran 2012 hanya mencapai Rp.1.1 triliun atau 99 persen lebih dari target yang telah ditetapkan.

Sedangkan penerimaan PAD TA 2013 hanya mencapai Rp1.3 triliun atau 97 persen dari target yang ditetapkan.

Khusus untuk realisasi penerimaan retribusi daerah TA 2012 menunjukkan angka kurang baik, hanya mencapai Rp89 miliar atau 79 persen.

Sementara di TA 2013 hanya mencapai 101 miliar atau 89 persen.

"Tentu hal ini menjadi perhatian serius buat kita bersama untuk lebih fokus dan berkonsentrasi serta dijadikan motivasi untuk bekerja lebih giat lagi sehingga target yang

ditetapkan pada 2014 bisa tercapai optimal," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM ketika membuka Rakor Pendapatn Daerah di Mahkota Hotel, Kamis (4/9).

Menurutnya ada beberapa temuan yang menjadi kendala umum dalam pengelolaan retribusi daerah yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih adanya dinas/badan dan unit kerja teknis yang mengelola dan melaksanakan pur-

berikan laporan bulanan maupun triwulan sebagaimana mestinya. Hal ini akhirnya jadi catatan dan temuan oleh BPK, Inspektorat dan Itjen Kemendagri ketika melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Kemudian, lanjut Zeet, dinas/unit kerja teknis belum akurat dalam memprediksi target penerimaan. Sehingga tidak jarang ditemui dalam proses perubahan anggaran terjadi penurunan atau penambahan target secara drastis.

"Ditemukan ada beberapa objek retribusi daerah yang belum diaudit dalam Perda sehingga hal ini berpengaruh bagi kelancaran pelaksanaannya, dimana

secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan," beberrnya.

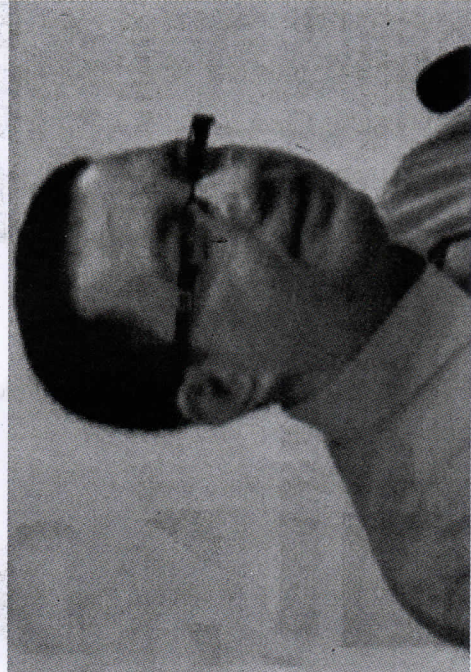
Sekda menambahkan faktor lain yaitu dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Hal tersebut menurutnya sangat berdampak bagi pengelolaan retribusi daerah khususnya terhadap objek retribusi daerah yang dalam teknik operasionalnya menggunakan sumber energi tersebut.

"Hal ini mengakibatkan biaya operasional menjadi tinggi, sehingga perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali mengenai tarif yang sudah diatur dalam Perda yang ada," pungkasnya. (ire)

berikan laporan bulanan maupun triwulan sebagaimana mestinya. Hal ini akhirnya jadi catatan dan temuan oleh BPK, Inspektorat dan Itjen Kemendagri ketika melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Kemudian, lanjut Zeet, dinas/unit kerja teknis belum akurat dalam memprediksi target penerimaan. Sehingga tidak jarang ditemui dalam proses perubahan anggaran terjadi penurunan atau penambahan target secara drastis.

"Ditemukan ada beberapa objek retribusi daerah yang belum diaudit dalam Perda sehingga hal ini berpengaruh bagi kelancaran pelaksanaannya, dimana



M. Zeet Hamdy Assovie

PONTIANAK-RK Realisasi penerimaan pendapa-
tan asli daerah (PAD) yang memuaskan. Real-
belum mencapai hasil isasi penerimaan tahun